

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi pekerja migran dalam penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 tidak terlepas dari dinamika migrasi tenaga kerja global, di mana kebutuhan tenaga kerja di Qatar dan kondisi ekonomi di negara asal pekerja migran saling mempengaruhi. Qatar sebagai negara kecil dengan populasi domestik yang terbatas mengalami lonjakan kebutuhan tenaga kerja akibat proyek pembangunan infrastruktur skala besar, terutama sejak ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Qatar mengandalkan jutaan pekerja migran dari negara-negara Asia Selatan seperti Nepal, India, Bangladesh, dan Pakistan, yang mengalami keterbatasan lapangan kerja dan tekanan ekonomi di negara asal mereka. Namun, sistem kafala yang berlaku di Qatar menciptakan ketergantungan penuh pekerja migran pada majikan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, Amnesty International memainkan peran utama sebagai instrumen advokasi dan aktor independen dalam menyoroti serta menekan pihak-pihak terkait untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Sebagai instrumen advokasi, Amnesty menggunakan strategi berbasis penelitian dengan menerbitkan laporan-laporan investigatif yang mendokumentasikan eksploitasi tenaga kerja, seperti *“The Ugly Side of the Beautiful Game”* (2016) dan *“Unfinished Business”* (2021) (Amnesty International, 2016). Laporan-laporan ini memberikan dasar bagi kampanye global yang mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan di Qatar. Amnesty juga memanfaatkan diplomasi hak asasi manusia untuk menekan FIFA, pemerintah Qatar, serta negara asal pekerja migran agar mengambil langkah nyata dalam melindungi pekerja.

Sebagai aktor independen, Amnesty International bertindak tanpa afiliasi dengan kepentingan ekonomi atau politik tertentu, sehingga mampu memberikan evaluasi objektif terhadap kebijakan ketenagakerjaan Qatar (Amnesty International, 2020). Amnesty tidak hanya mengungkap eksploitasi yang terjadi, tetapi juga terus mengawasi implementasi reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Qatar pasca 2016, termasuk penghapusan sistem kafala dan revisi undang-undang tenaga kerja. Amnesty juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa janji reformasi yang dibuat oleh Qatar benar-benar diterapkan dan tidak sekadar menjadi strategi diplomasi tanpa perubahan substantif di lapangan.

Dengan demikian, keterlibatan Amnesty International dalam isu pekerja migran di Qatar menunjukkan bahwa organisasi hak asasi manusia dapat berperan tidak hanya sebagai pemantau, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam advokasi kebijakan global. Amnesty berhasil membangun tekanan internasional terhadap FIFA dan pemerintah Qatar, sekaligus memberikan suara bagi pekerja migran yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan ketenagakerjaan di Qatar. Namun, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam reformasi kebijakan tenaga kerja, Amnesty tetap menilai bahwa langkah-langkah yang diambil belum cukup untuk sepenuhnya menghapus eksploitasi pekerja migran. Oleh karena itu, Amnesty terus menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi untuk memastikan bahwa reformasi ketenagakerjaan di Qatar berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Saran Praktis Dan Akademis Dalam Advokasi Eksploitasi Pekerja Migran di Qatar

Saran Praktis

Saran praktis pertama yang dapat dilakukan oleh Amnesty International adalah memperkuat kerja sama dengan aktor multilateral. Amnesty bisa meningkatkan kolaborasi dengan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Human Rights Watch (HRW). Kerja sama ini penting untuk menciptakan sebuah tekanan bersama terhadap pemerintah Qatar agar segera melakukan reformasi pada kebijakan ketenagakerjaan, khususnya untuk menghapuskan sistem kafala yang telah terbukti mendatangkan banyak masalah bagi pekerja migran. Dengan kekuatan dari berbagai pihak internasional, Amnesty dapat lebih memperkuat upayanya dalam mencapai perubahan yang signifikan.

Selain itu, Amnesty perlu menyesuaikan strategi advokasinya dengan karakteristik politik dan budaya Qatar. Pendekatan berbasis dialog, baik dengan pemerintah Qatar maupun dengan perwakilan pekerja migran, bisa lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan naming and shaming yang lebih sering mendapat respons defensif dari pihak Qatar. Menggunakan jalur diplomatik dan membangun hubungan dengan berbagai pihak yang berkuasa dapat membuka peluang untuk melakukan perubahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Amnesty juga bisa lebih aktif dalam mendorong penerapan standar ketenagakerjaan internasional yang sudah diatur dalam konvensi-konvensi ILO. Salah satunya adalah

Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, yang seyogianya diterapkan di Qatar dalam konteks proyek-proyek yang melibatkan pekerja migran. Amnesty dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia untuk menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, Amnesty dapat memperluas program bantuan hukum untuk pekerja migran melalui kerja sama dengan firma hukum internasional dan organisasi lokal yang memberikan bantuan kepada pekerja yang menjadi korban eksploitasi. Pembentukan mekanisme pengaduan independen juga menjadi langkah penting untuk memfasilitasi pekerja migran dalam melaporkan pelanggaran hak-hak mereka tanpa takut adanya pembalasan dari majikan atau pemerintah Qata. Amnesty sebaiknya mendorong adanya transparansi lebih dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di Qatar. Misalnya, mengusulkan pembentukan sistem audit independen yang memantau kondisi kerja pekerja migran secara berkala. Langkah ini akan memberikan data yang objektif dan dapat dijadikan alat untuk memantau apakah standar ketenagakerjaan di Qatar benar-benar diterapkan atau hanya sebatas formalitas.

Saran Akademis

Dari sisi akademis, ada beberapa saran yang dapat memperkaya kajian mengenai peran Amnesty International dalam kasus eksploitasi pekerja migran di Qatar. Pertama, pengembangan kerangka teoritis yang mengkaji peran NGO dalam advokasi hak pekerja migran sangat diperlukan. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas organisasi non-pemerintah dalam mengadvokasi hak pekerja migran di negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter, seperti Qatar, bisa memberikan wawasan penting mengenai keberhasilan atau kegagalan model advokasi Amnesty di negara tersebut.

Kemudian, studi akademis yang lebih mendalam mengenai strategi Amnesty International di Qatar dibandingkan dengan negara lain seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi akan memberikan gambaran lebih luas mengenai kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan yang dilakukan oleh Amnesty di berbagai negara. Ini penting untuk menilai apakah ada pola yang dapat diterapkan di negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa.

Selain itu, penelitian mengenai dampak advokasi Amnesty terhadap perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Qatar juga sangat diperlukan. Penelitian semacam ini dapat mengukur sejauh mana tekanan yang diberikan oleh Amnesty berhasil mendorong perubahan kebijakan, misalnya dalam hal sistem kafala atau perbaikan kondisi kerja di sektor konstruksi. Studi akademis juga bisa lebih mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan dalam advokasi hak pekerja migran. Penggunaan teknologi, seperti big data dan artificial intelligence (AI) untuk pemantauan kondisi kerja pekerja migran, bisa menjadi terobosan baru dalam upaya memantau dan melaporkan pelanggaran secara lebih efektif. Secara keseluruhan, saran praktis dan akademis ini diharapkan dapat memperkuat advokasi Amnesty International dalam menangani eksploitasi pekerja migran di Qatar, baik melalui peningkatan langkah-langkah konkret di lapangan maupun pengembangan kajian akademis yang lebih mendalam untuk memperkaya pemahaman tentang peran dan dampak organisasi ini dalam isu hak asasi manusia.